



ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION

email: ahrc@ahrc.asia
web: www.humanrights.asia
phone: (+852) 26986339
fax: (+852) 26986367

G/F, 52 Princess Margaret Road
Ho Man Tin
Kowloon
Hong Kong SAR

FOR IMMEDIATE RELEASE

AHRC-OLT-004-2023-01

Mei 19, 2023

Surat Terbuka Untuk :

1. **Majelis Hakim Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Terdakwa: Haris Azhar)**
2. **Majelis Hakim Perkara No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Terdakwa: Fatiah Maulidiyanty)**

Jl. Dr. Sumarno No. 1, RT.7/RW.4, Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur
DKI Jakarta -13940 Telp : +622148703788 | Faks : +622148703786 |
Email : info@pn-jakartatimur.go.id | Email Delegasi : del.pnjaktim@gmail.com | Instagram :
@pn_jakartatimur

Re: Sahabat pengadilan (*amicus curiae*) untuk hakim perkara Haris dan Fatiah

Majelis hakim yang mulia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Prakash Mohara**, Direktur Eksekutif dari Asian Human Rights Commission (AHRC), sebuah organisasi Hak Asasi Manusia internasional yang berkedudukan di Hong Kong, ingin menyampaikan pandangan dan harapan sebagai berikut:

Bapak Haris Azhar dan Ibu Fatiah Maulidiyanty menurut saya adalah dua warga negara yang baik yang telah menjadi panutan bagi banyak orang, khususnya generasi muda di Indonesia.

Mereka adalah aktivis hak asasi manusia yang mengadvokasi semua kelompok, tanpa memandang latar belakang yang mereka perjuangkan. Mereka juga warga negara yang telah mengenyam pendidikan yang layak dan memiliki pengalaman sebelumnya melakukan kegiatan ilmiah, penelitian, dan advokasi sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi tempat mereka bekerja. Kegiatan riset, hasil riset, dan diskusi tentang hasil riset yang mereka lakukan tidak boleh dipidana demi kebenaran dan keadilan. Pidanaan riset, hasil riset, dan periset serta mereka yang mendesiminasikan/mendiskusikan hasil riset adalah kebijakan yang anti-sains, anti ilmu pengetahuan. Selanjutnya penggunaan pasal-pasal karet UUTE harus segera dihentikan dan UU *draconian* tersebut harus direvisi total segera.

Oleh karena itu, kami berharap kedua pegiat HAM dan peneliti kebijakan Indonesia yang tangguh ini dibebaskan dari segala tuduhan dan dikembalikan status dan haknya sebagai warga negara yang bermartabat, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya dalam bentuk apapun.

Demikian pandangan dan harapan ini Saya sampaikan dengan sebenarnya untuk kebenaran dan keadilan.

Hormat Saya,

Prakash Mohara

Direktur Eksekutif Asian Human Rights Commission

